

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu meningkatkan pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut demi terciptanya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Siregar, 2015:291).

Salahsatu pelaksanaan reformasi sektor publik yang dilakukan diantaranya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya dengan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2016:159).

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa

pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya (Hanafi dan Halim, 2016:49). Entitas pelaporan sendiri merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Representasi kewajaran laporan keuangan dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (Ratifah dan Ridwan, 2012). Berkenaan dengan opini yang dikeluarkan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah terdapat empat macam opini sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu : (1) Wajar Tanpa Pengecualian, (2) Wajar dengan Pengecualian, (3) Tidak Wajar, dan (4) Tidak Memberikan Pendapat.

Pada kenyataannya dari hasil pemeriksaan BPK tidak semua pemerintah daerah sudah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan data tahun 2019 menyebutkan bahwa tiga Kabupaten di Jabar gagal raih opini WTP. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yaitu Sahat MT Panggabean mengatakan dari 28 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat terdapat 25 pemerintah daerah yang LKPDnya memperoleh opini WTP, sementara tiga pemerintah daerah lainnya yakni kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat (Fatimah, 2019). Di bawah ini akan disajikan data opini audit atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode 2015-2020 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Tahun	Opini Audit
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : LKPD Pemkab Bandung Barat

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2018 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini WDP secara terus-menerus menunjukkan kualitas laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini WDP pada tahun 2015-2018 diantaranya dikarenakan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah yang belum optimal.

Pada tahun 2018 diketahui bahwa belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berkaitan dengan masih rendahnya realisasi serapan anggaran belanja daerah. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyisakan angka yang cukup signifikan. Sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2017 mencapai Rp 304 miliar mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang mencapai Rp 166 miliar. Hal itu menjadi sorotan DPRD Kabupaten Bandung Barat, sebab besarnya Silpa menunjukkan tidak optimalnya kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Samsul Maarif selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat mengungkapkan Silpa mengindikasikan perencanaan program yang tidak matang oleh pemerintah daerah, akibatnya anggaran tidak terserap maksimal sehingga pembangunan menjadi tersendat (Sari, 2018).

Selain itu diketahui bahwa gagalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam memperoleh opini WTP pada tahun 2018 akibat terganjal penggelapan dana Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sebesar Rp 7,7 miliar di RSUD Lembang. Bupati Pemkab Bandung Barat yaitu Aa Umbara Sutisna mengungkapkan kegagalan meraih WTP dikarenakan mantan Direktur RSUD Lembang dan bendaharanya yang membawa kabur uang BPJS total nilai mencapai Rp7,7 miliar untuk anggaran tahun 2017 dan 2018. Akibat kasus tersebut, Pemkab harus mengembalikan uang negara yang dikorupsi itu. Namun selain masalah di atas, Pemkab Bandung Barat selalu mendapatkan opini WDP secara berturut-turut sejak tahun 2012 akibat masalah aset daerah (Sari, 2019).

Dari beberapa uraian di atas menunjukkan belum optimalnya pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat diantaranya terkait dengan rendahnya realisasi penyerapan anggaran belanja daerah dan berbagai kasus korupsi keuangan daerah menjadi salahsatu penyebab Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini WDP pada tahun 2017-2018.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Elsye, 2016:2). Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas laproan keuangan pemerintah daerah. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keungan daerah (Chabib dan Heru, 2014:67).

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan salahsatu alat pengendalian pemerintah daerah dan merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengolahan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keungan daerah yang efektif dan efisien guna menghasilkan laporan informasi keuangan dengan

akurat dan tepat waktu. Jadi semakin tinggi efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan (Yusup, 2016). Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lestari dan Hastuti, 2020).

Selain itu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan aset daerah menjadi salahsatu penyebab gagalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini WDP pada tahun 2017-2018. Pada tahun 2019 diketahui bahwa aset sebanyak 1.444 bidang yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat bersifat *illegal* atau tidak resmi, karena aset-aset tersebut tidak memiliki sertifikat dan saat ini hanya berpegang pada surat pelimpahan aset yang berasal dari daerah induk yakni Kabupaten Bandung dan banyaknya aset tetap yang belum tertib penyalurannya, pertanggungjawaban belanja, pencatatan dan inventarisasi yang masih belum sesuai (Sari, 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. Salah stau aset yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan

administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (IAI, 2018:49).

Pengelolaan aset bertujuan untuk membantu suatu organisasi dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Meliputi petunjuk cara perancangan aset, pengoperasian/penggunaan aset sampai pada penghapusan aset serta resiko yang mungkin ada selama siklus hidup aset (Yusuf, 2015:198). Kegiatan inventarisasi aset dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Mengacu pada prinsip *good governance* bahwa pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang tranparan dan akuntabel. Tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk aset tetap berupa barang milik daerah (BMD). Semakin baik pengelolaan aset daerah, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Anshari dan Syofyan, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Yusup (2016) menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul penelitian yang akan diajukan yaitu sebagai berikut

: “Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Pengelolaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.”

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan data menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2018 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini WDP secara terus-menerus menunjukkan kualitas laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini WDP pada tahun 2015-2018 diantaranya dikarenakan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah yang belum optimal.
2. Permasalahan yang menjadi penyebab Pemkab Bandung Barat mendapatkan opini WDP diantaranya permasalahan pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan rendahnya realisasi penyerapan anggaran belanja daerah dan berbagai kasus korupsi keuangan daerah. Selain itu permasalahan aset daerah juga menjadi penyebab Pemkab Bandung Barat mendapatkan opini WDP. Berdasarkan data menunjukkan bahwa sebanyak 1.444 bidang aset yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat bersifat *illegal* atau tidak resmi, karena aset-aset tersebut tidak memiliki sertifikat, banyaknya aset tetap

yang belum tertib penyalurannya, pertanggungjawaban belanja aset, pencatatan dan inventarisasi yang masih belum sesuai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bagaimana pengaruh pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimana pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang dituangkan dalam bentuk skripsi/tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan khususnya pada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Dapat memperdalam dan menambah pengetahuan penulis berkenaan dengan pengaruh pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Serta sebagai syarat dalam menempuh ujian tugas akhir (skripsi) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah masukan untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang sifatnya mengarah pada perbaikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah melalui efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan pengelolaan aset tetap yang memadai.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan informasi tambahan mengenai pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan (Elsye, 2016:2).

Pengelolaan aset atau barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah (PP No 71 Tahun 2010). Pengelolaan aset tetap daerah diukur menggunakan indikator inventarisasi aset daerah, legal audit aset daerah, penilaian aset daerah, optimalisasi aset daerah, dan pengawasan dan pengendalian aset daerah (Yusuf, 2015:179).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No 71 Tahun 2010). Kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan indikator relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Rasdianto dan Rambe. 2015:30).

1.6.2 Studi Empiris

Berikut ini akan disajikan beberapa rangkuman mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Dewi dan Mimba (2014)	Pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) pada kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel pengelolaan aset.
2.	Sundari (2018)	Pengaruh pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pengelolaan aset tetap serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya tidak

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
				menggunakan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
3.	Yusup (2016)	Pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel pengelolaan aset.
4.	Lestari dan Hastuti (2020)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia dan peran audit internal sedangkan pada penelitian ini tidak.
5.	Poae dkk (2017)	Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pengelolaan aset/ barang milik daerah serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
6.	Anshari dan Syofyan (2016)	Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pengelolaan aset/ barang milik daerah serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
7.	Rami (2014)	Pengaruh penatausahaan barang milik aceh terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pengelolaan aset/ barang milik daerah serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
8.	Lestari (2016)	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pengelolaan aset tetap serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel sistem akuntansi keuangan daerah.
9.	Caesarima (2017)	Pengaruh pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pengelolaan aset tetap serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

1.6.3 Kerangka Konseptual

1.6.3.1 Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Elsye, 2016:2). Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas laproan keuangan pemerintah daerah. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus

berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (Chabib dan Heru, 2014:67).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/122/BAKD Tahun 2008 menyebutkan tujuan utama program sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah mengembangkan, menginstalasikan, dan mengimplementasikan aplikasi keuangan daerah berdasarkan *international best practice* komputerasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Melalui penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mempermudah pemerintah untuk mengelola keuangan di daerahnya dengan efektif, efisien, dan ekonomis serta dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang andal dan relevan. Semakin tinggi penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah akan berdampak pada peningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan salahsatu alat pengendalian pemerintah daerah dan merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengolahan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien guna menghasilkan laporan informasi keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Jadi semakin tinggi efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan (Yusup, 2016). Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini

mengindikasikan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lestari dan Hastuti, 2020).

1.6.3.2 Pengaruh Pengelolaan Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

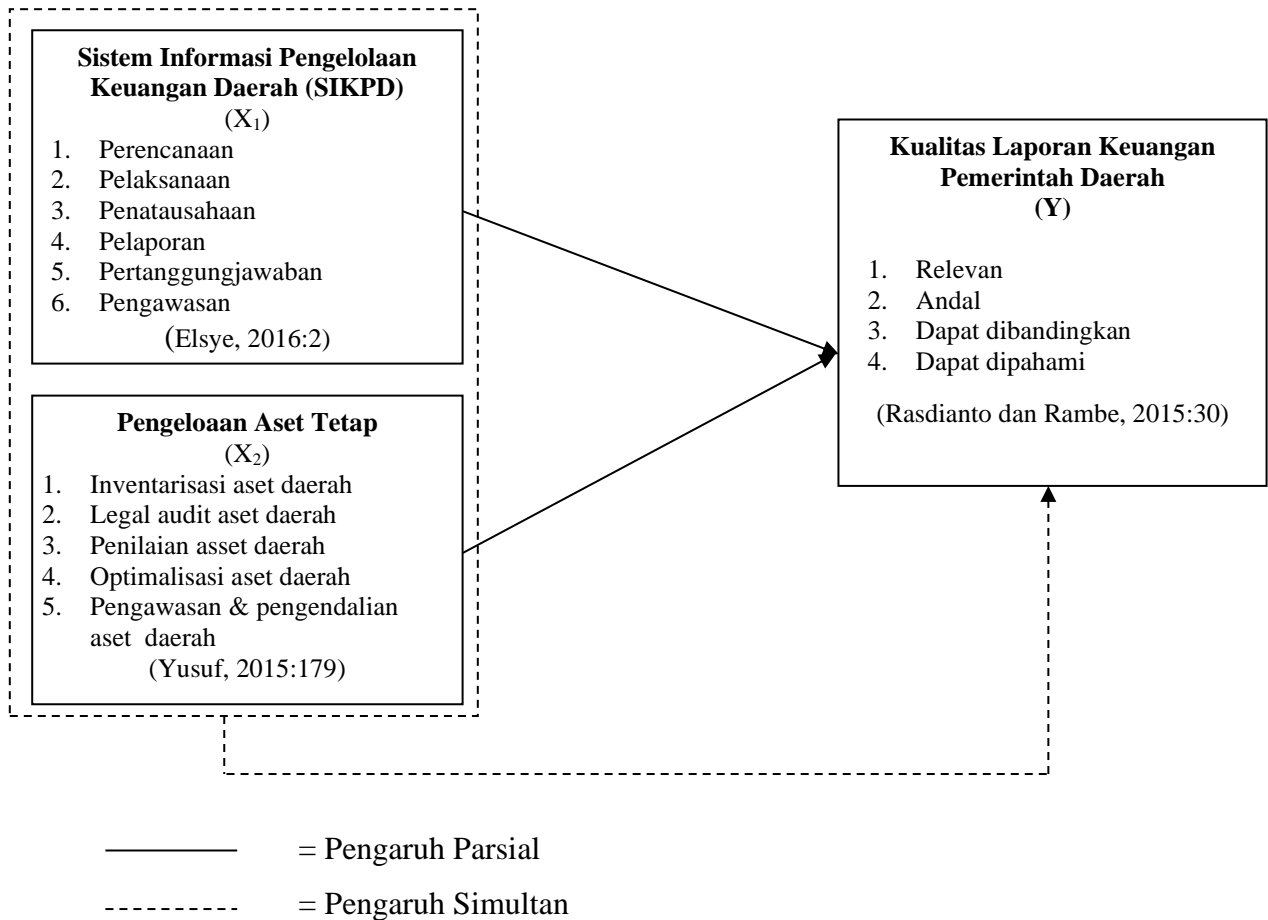
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Salah satu aset yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (IAI, 2018:49). Pengelolaan aset bertujuan untuk membantu suatu organisasi dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Meliputi petunjuk cara perancangan aset, pengoperasian/penggunaan aset sampai pada penghapusan aset serta resiko yang mungkin ada selama siklus hidup aset (Yusuf, 2015:198).

Pemerintah daerah dalam hal ini harus serius dalam mengelola aset. Apalagi aset terkait dengan bagaimana cara mengelola aset tetap, agar aset tetap tersebut terinventarisir, ternilai, tersajikan serta terungkap sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kegiatan inventarisasi aset dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Mengacu pada prinsip *good*

governance bahwa pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang tranparan dan akuntabel. Tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk aset tetap berupa barang milik daerah (BMD). Semakin baik pengelolaan aset daerah, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Anshari dan Syofyan, 2016).

Penatausahaan/pencatatan barang daerah sangat penting dikarenakan catatan tersebut dijadikan objek audit oleh BPK dalam meyakini penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya *database* yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta akan menghasilkan laporan aset dineraca dengan angka yang tepat dan akurat sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik (Poae dkk, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud meng gambarkannya dalam sebuah bagan kerangka pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran peneliti yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.1
Paradigma Penelitian

1.6.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2017:64). Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang penulis ajukan : **“Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”**